

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat dikenal sebagai negara yang memiliki banyak potensi dan bermacam-macam sumber daya yang berlimpah serta sumber daya manusia yang berkualitas tetapi belum di tangani dengan optimal. Perlunya upaya untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang didapatkan dari dukungan semua sektor yang dimiliki agar terciptanya pembangunan ekonomi yang merata di semua wilayah yang akan tumbuh secara optimal.

Pada Undang-Undang Dasar 1945 ke-4 menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan mempunyai fungsi membangun masyarakat yang makmur dan adil. Untuk tercapainya hal tersebut diperlukan proses perbaikan dan kemajuan yang berkesinambungan, yang bisa disebut pembangunan daerah.

Pemerintah Indonesia saat ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui otonomi daerah. Otonomi berasal dari Bahasa Yunani *outos* dan *nomos*, *autos* berarti “sendiri” dan *nomos* “pemerintah”, sehingga otonomi berarti “memerintah sendiri” Otonomi daerah dilihat sebagai salah satu cara untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah secara nyata yang efisien dan efektif serta berwibawa guna mewujudkan pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Otonomi daerah mempunyai tiga tujuan utama, yaitu: (1) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat, (2) Meningkatkan sosial budaya masyarakat, (3) Meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Dengan adanya pelaksanaan ini, Otonom kemudian berhak mengatur pengurusan keluarganya sendiri sesuai dengan norma hukum sesuai dengan keinginan masyarakat. Otonomi daerah merupakan sistem yang telah ada di negara Indonesia kurang lebih 20 tahun. Salah satu wewenangnya dari segi keuangan daerah, menurut UU 33 Tahun 2004, pendanaan daerah ditopang oleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah serta Provinsi ke Kabupaten/Kotamadya yang merupakan persyaratan sistem pemerintah daerah. Kemampuan mengelola keuangan daerah menjadi tolak ukur kemandirian daerah.

Kemandirian daerah tercapai apabila pemerintah dapat menggali potensi daerah sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan untuk memajukan pembangunan daerah UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerinah Daerah dan Pusat, menetapkan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi penerimaan daerah terdiri dari pembiayaan dan pendapatan daerah, yang salah satunya ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Al-Quran dengan tegas telah menetapkan keharusan adanya pemerintahan. Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk membiasakan dan berlatih diri dalam urusan-urusan pemerintahan, sebagaimana perintah yang juga ditunjukkan kepada segenap kaum Muslimin.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar

mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur:55)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dan dipungut berdasarkan perda sesuai dengan peraturan Undang-undang. Pemerintah harus mengoptimalkan PAD untuk mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dengan mengkaji kekuatan dan potensi PAD sebagai sumber. Adanya PAD yang cukup besar dapat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki minat yang besar untuk berbagi biaya pembangunan dengan pemerintah. Metode peningkatan PAD harus kreatif dan inovatif agar potensi daerah berkembang sebagaimana dimaksud dan tercapai pembangunan.

Peningkatan PAD adalah upaya yang dapat dijalani oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Perbedaan potensi ekonomi daerah yang besar memungkinkan beberapa dari daerah tertentu untuk mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui upaya penggalian potensi ekonomi daerah yang ada dan tidak dimanfaatkan. Untuk mengetahui potensi apa yang ada di setiap daerah dibutuhkannya sebuah metode untuk melihat faktor yang perlu dianalisis, sehingga bisa menggali potensi yang ada dan meningkatkan PAD seperti peningkatan cakupan, kondisi awal daerah, perkembangan PDRB, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pertumbuhan penduduk, pembangunan baru dan perubahan peraturan.

Penelitian yang serupa dengan penelitian ini antara lain: Penelitian yang dilakukan oleh Mellisa Arum Rahmawati (2018) mengenai Analisis Sub Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Bali (2007-2016). Penelitian

ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap PAD, faktor yang dianalisa meliputi Jumlah Hotel, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Sarana Angkutan dan PDRB. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel dengan tahun 2007 sampai dengan 2016 dengan sebanyak 9 Kab/Kota di Bali. Hasil regresi pada penelitian ini menggunakan *Fixed Effect Model* yang diketahui variabel JOW, JKW, JSA dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan JH tidak signifikan berpengaruh terhadap PAD di Provinsi Bali.

Penelitian yang dilakukan oleh Rheza Prima Putra (2017) mengenai Analisis Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto, Jumlah Wisatawan dan Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali tahun 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi PAD sebagai variabel dependen dan PDRB, Jumlah Wisatawan dan Jumlah Hotel di Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode data panel dengan teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang mempengaruhi PAD adalah PDRB dan Jumlah Hotel. Variabel selebihnya tidak berpengaruh terhadap PAD di Provinsi Bali pada tahun 2011-2015.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Deby Lyana Dewi, Lucia Rita Indrawati, Yustirania Septiani (2020) mengenai Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Hotel, dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah objek wisata, dan jumlah penduduk terhadap PAD di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018. Teknik yang dilakukan untuk menganalisis adalah regresi data panel. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa

variabel JKW, JOP, JH, dan JP berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Adapun tabel yang ada di bawah merupakan akumulasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Ini merupakan table mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh Provinsi Jambi dari tahun 2014-2020.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi

Jenis Penerimaan Pemerintah	Penerimaan Pemerintah Provinsi (Ribu Rupiah)						
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Pendapatan Asli Daerah	1665326	1651090	1657078	1580304	1257258	1241223	1281239

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dalam tujuh tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 jumlah pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi menunjukkan kenaikan di setiap tahunnya yaitu pada tahun 2014 pendapatan asli daerah berjumlah 1,281 Triliun, kemudian ditahun 2015 mengalami penurunan yang sangat sedikit yaitu 1,241 Triliun, kemudian meningkat lagi pada tahun 2016 sebesar 1,257 Triliun, kemudian sangat meningkat pada tahun 2017 menjadi 1,580 Triliun, kemudian meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 1,657 Triliun, namun pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan yaitu 1,651 Triliun dan meningkat lagi pada tahun 2020 menjadi 1,665 Triliun.

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah Per Provinsi Pulau Sumatera

Provinsi	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020
Aceh	3.097.024.953.300
Sumatera Utara	7.583.849.755.000
Sumatera Barat	2.251.335.223.000
Riau	3.333.176.032.497
Kepulauan Riau	1.195.637.693.103
Jambi	1.665.326.000.000
Provinsi	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

Bengkulu	7.123.455.486.010
Sumatera Selatan	3.375.100.984.000
Kepulauan Bangka Belitung	6.857.558.161.120
Lampung	1.130.709.788.662

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat perbandingan Pendapatan Asli Daerah antar Provinsi di pulau Sumatera pada tahun 2020. Nilai PAD terbesar ada pada Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 7,583 Triliun dan yang terkecil pada Provinsi Lampung yaitu 1,130 Triliun.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi?
4. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2014-2020
2. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2014-2020

3. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2014-2020
4. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2014-2020
5. Untuk menganalisis pengaruh PDRB, Jumlah Hotel, Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2014-2020

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik diantaranya:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat membawa manfaat pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan dan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menetapkan dan merumuskan kebijakan yang terkait dengan pengembangan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk pemahaman kontribusi kepada pemerintah atau otoritas terkait.